

# INDAHNYA PELANGI KARENA PERBEDAAN

## Menuju Masyarakat Komunikatif

I Wayan Winaja

Abstrak

Isu tentang etnis dan etnisitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan realita yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Para anggota kelompok etnis dilahirkan, dididik, dan dibesarkan dalam suasana askriptif primordial etnisitas Akibatnya perbedaan antara 'siapa saya' dengan 'siapa anda' atau 'siapa kami' dengan 'siapa mereka' terlihat dengan jelas batas-batasnya. Dalam kenyataan seperti itu, stereotip dan prasangka tumbuh dan berkembang dengan subur. Pernyataan itu bukan sebuah ratapan di kesudahan suatu zaman yang penuh kekecewaan, namun sebaliknya merupakan sebuah harapan dalam sebuah kritis yang dapat mengembalikan zaman itu pada cita-citanya semula., yang artinya bahwa pencerahan komunikasi harus didasari atas kekuasaan argument terkuat yang diperkuat oleh alasan-alasan dan bukti empiris non-positivis.

Kata Kunci: Pelangi Perbedaan dan Masyarakat Komunikatif.

### 1. Pendahuluan

Keniscayaan alam yang sangat memukau nurani dari rekonstruksi keberagaman warna telah ditunjukkan oleh Pelangi. Di dalamnya terdapat aneka warna yang bebas merdeka saling menunjukkan identitasnya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu (mejikuhibiniu), terasa tanpa ada dominasi, dan hegemoni. Semuanya merdeka menyatu menumbuhkan kesamaan "derajat". Pembelajaran yang diberikan alam adalah sebuah keniscayaan bahwasanya perbedaan memang tidak bisa dihindari, sebuah keniscayaan yang harus kita hargai, dan kita hormati. Pertanyaan besar yang harus dicarikan jawaban adalah, alam dengan mudah saling memahami perbedaan mengapa "isi alam (manusia)" masih ada yang mempermasalahkan perbedaan. Habermas (1987) menyatakan bahwa, paradigma filsafat kesadaran sudah kehabisan tenaganya. Kalau demikian, filsafat kesadaran yang kehabisan

tenaga itu mesti disingkirkan dengan beralihan ke paradigma pemahaman timbal-balik.

Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi dari satu mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya. Menurut Hall (1959) dalam Mulyana (ed) (2000:vi) menyatakan bahwa, "*culture is communication*" and *communication is culture*". Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda dan karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda, cara kita berkomunikasi sangat bergantung pada budaya kita: bahasa, aturan, dan norma. Pada tahun 1929 seorang linguis terkemuka, Edward Sapir mengingatkan ilmuwan sosial bahwa bahasa-bahasa yang berlainan mempengaruhi cara berpikir, "... *the Real World is to a large extent unconsciously*

*built up on the language habits of the group... We see and hear and otherwise experience very largely as we do because the language habits of our community predispose certain choices of interpretation*". Perbedaan-perbedaan ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal. Perbedaan ekspektasi dalam komunikasi sekurang-kurangnya menyebabkan komunikasi tidak lancar, timbul perasaan tidak nyaman atau kesalahpahaman.

Dewasa ini kesalahpahaman-kesalahpahaman seperti itu masih sering terjadi ketika kita bergaul dengan kelompok-kelompok budaya yang berbeda. Problem utamanya adalah kita cenderung menganggap budaya kita sebagai suatu "kemestian", tanpa mempersoalkannya lagi (*take for granted*), dan karenanya kita menggunakannya sebagai standar untuk mengukur budaya-budaya lain. Bila seseorang tidak menyetujui nilai-nilai kita, sering disimpulkan berdasarkan etnosentrisme bahwa orang itu salah, atau distempel bodoh. (Lihat kasus RUU Pornografi, Kasus Monas yang melibatkan FPI). Pernyataan itu bukan sebuah ratapan di kesudahan suatu zaman yang penuh kekecewaan, namun sebaliknya merupakan sebuah harapan dalam sebuah kritis yang dapat mengembalikan zaman itu pada cita-citanya semula., yang artinya bahwa pencerahan komunikasi harus didasari atas kekuasaan argument terkuat yang diperkuat oleh alasan-alasan dan bukti empiris non-positivis. Hal itu merupakan penyeimbang kalau tidak boleh disebut perlawanan terhadap pernyataan Horkheimer dan Adorno dalam Agger (2008:342) yang menyatakan bahwa pencerahan memperlakukan sesuatu sebagaimana seorang diktator memperlakukan manusia, karena hal itu yang akan memunculkan "kenakalan birokrat" yang mengambil semua posisi struktural yang disebut Marx sebagai komite eksekutif borjuis, dengan melupakan perbedaan (plural, dan multi) yang memunculkan dominasi (Agger, 2008:347; Hardiman, 1993:xiv).

## 2. Cita-cita Universal Menuju Masyarakat Komunikatif

Komunikasi adalah titik tolak fundamental yang erat hubungannya dengan usaha mengatasi "kemacetan". Penggolongan berdasarkan ras, etnik merupakan akar rasisme, yang sangat memungkinkan muncul kebuntuan komunikasi dan dekonstruksi integrasi di antara yang ada. Dekonstruksi rasisme, dominasi, hegemoni wajib hukumnya untuk menuju masyarakat komunikatif dalam sebuah integrasi yang berintegritas.

### 2.1 Keragaman Etnis dan Pluralitas Budaya

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dicirikan oleh adanya keragaman budaya. Keragaman budaya tersebut antara lain terlihat dari adanya perbedaan etnis (suku bangsa), agama, dan bahasa. Pada satu sisi kemajemukan budaya merupakan kekayaan bangsa, namun pada sisi yang lain, pluralitas kultural memiliki potensi, yang menyebabkan terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa. Dalam konteks tersebut seperti dikemukakan oleh Rahardjo (2005: 1) bahwa pluralitas kultural sering kali dijadikan alat untuk memicu munculnya konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), meskipun sebenarnya faktor-faktor penyebab dari pertikaian tersebut lebih banyak disebabkan oleh persoalan-persoalan ketimpangan dalam bidang ekonomi, dan ketidakadilan sosial politik.

Dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional terkait menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka kesadaran kritis perlu dikembangkan melalui pendidikan multikultural, seperti yang diwacanakan berbagai kalangan. Jika upaya tersebut tidak segera dilakukan maka dikhawatirkan muncul berbagai gerakan separatis yang mengancam stabilitas bangsa dan negara. Gerakan pemisahan diri itu terjadi karena masyarakat Indonesia multikultur secara demografis dan sosiologis, sangat berpotensi bagi terjadinya konflik, karena

masyarakat terbagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan identitas kultural. Menurut Ting-Toomey (1999:30) identitas kultural merupakan perasaan (*emotional significance*) dari seseorang untuk ikut memiliki (*sense of belonging*) atau berafiliasi dengan kultur tertentu. Masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok kemudian melakukan identifikasi kultural, yaitu masing-masing orang mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Identifikasi kultural ini, menurut Rogers & Steinfatt (1999: 97) akan menentukan individu-individu yang termasuk dalam *in-group* dan individu-individu yang berada dalam *out-group*. Bagaimana mereka berperilaku, sebagian ditentukan oleh, apakah mereka termasuk ke dalam budaya tertentu atau tidak.

Dalam konteks identifikasi kultural, Suparlan (2002) menilai bahwa isu tentang etnis dan etnisitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan realita yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Para anggota kelompok etnis dilahirkan, dididik, dan dibesarkan dalam suasana asriptif primordial etnisitas mereka. Akibatnya perbedaan antara 'siapa saya' dengan 'siapa anda' atau 'siapa kami' dengan 'siapa mereka' terlihat dengan jelas batas-batasnya. Dalam kenyataan seperti itu, stereotip dan prasangka tumbuh dan berkembang dengan subur. Bila semua suku bangsa yang mendiami negara Indonesia ini diliputi stereotip dan prasangka maka stabilitas nasional, persatuan dan kesatuan bangsa sulit diwujudkan.

Jadi tidak terbantahkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat sarat diwarnai adanya keragaman etnis (suku bangsa) dan pluralitas budaya. Menurut Juliawan dalam artikel yang berjudul "Kerangka Multikulturalisme" (*Kompas*, 28 September 2004), antara lain dikemukakan berbagai bentuk keragaman yang dimiliki Indonesia. Keragaman etnis sangat berpengaruh terhadap pluralitas budaya. Etnis

Jawa mewujudkan budaya Jawa. Etnis Bali mewujudkan budaya Bali, dan sebagainya. Jadi keragaman etnis secara signifikan berpengaruh terhadap munculnya pluralitas budaya. Keragaman di Indonesia sering digambarkan amat lebar sekitar dua puluh lima rumpun bahasa, lebih dari 250 rumpun dialek, sekitar 400 kelompok etnis dan suku bangsa, dan lima agama resmi serta berbagai bentuk kepercayaan. Kini keragaman semakin semarak setelah diakuinya secara resmi keberadaan etnis Tionghoa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia saat masa pemerintahan K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pluralitas budaya semakin lengkap, karena berbagai budaya etnis Tionghoa, seperti *harong say* diperbolehkan tampil di depan publik.

Pada konteks yang lain, jika berbicara tentang etnis Bali khususnya yang berada di Bali, ternyata pada setiap daerah (kabupaten < kota) juga memiliki budaya yang berbeda. Jadi etnis yang sama terkadang diwarnai pluralitas budaya, apalagi etnis yang berbeda dalam ruang lingkup negara, sudah tentu memiliki budaya yang berbeda. Kenyataan itu menyebabkan Indonesia, selain diwarnai keragaman etnis juga sangat sarat diwarnai pluralitas budaya, atau multikultural, yang jika dimaknai akan memunculkan diaspora (keterpencaran), dan identitas hibrida.

## 2.2. Diaspora dan Hibriditas Identitas

Menurut Barker (2005; 263-264) identitas yang stabil jarang dipertanyakan, ia tampak "alamiah" dan apa adanya. Meski demikian, ketika "kealamiahannya" tampak kabur, maka cenderung diperiksa kembali identitas yang kabur tersebut. Demikian pula menurut Mercer seperti dikutip Barker, bahwa identitas diperdebatkan dengan sengit ketika ia mengalami krisis. Jika pendapat ini dikaitkan dengan kehidupan masyarakat Bali, yang identitasnya "mulai mengalami" kekaburan maka muncul koreksi lewat wacana "Ajeg Bali". Jadi wacana "Ajeg Bali" relevan dikaji dari konteks ini. Menurut Brah (1996:183)

diaspora merupakan konsep relasi yang menunjuk pada "konfigurasi kuasa yang membedakan para diaspora secara internal sekaligus meletakkan hubungan antara satu dengan yang lain". Menurut Gilroy diaspora adalah bentuk-bentuk budaya yang telah mengalami kreolisasi, sinkretisasi, hibridisasi dan sangat tidak murni. Sebagai contoh Gilroy (1993) memperkenalkan konsep Atlantik Hitam. Menurut Gilroy, identitas kulit hitam tidak bisa dipahami dalam pengertian menjadi orang Amerika atau Inggris atau Indian Barat. Ia juga tidak bisa dimengerti dengan kerangka absolutisme etnis, melainkan ia harus dipahami dalam pengertian Diaspora Atlantik kulit hitam. Dengan konsep ini pertukaran budaya hibrida yang sama sekaligus berbeda, di dalam dan antara berbagai lokal diaspora. Konsep hibriditas memperlihatkan percampuran budaya dan kelahiran bentuk-bentuk identitas baru. Menurut Sunaryo dalam Sutrisno (Ed) (2004; 127) bahwa abad ke-19, hubungan antara Inggris dengan negeri jajahannya dapat dilihat melalui model hubungan kuasa Michel Foucault. Ada banyak generasi hibrid yang lahir dari perkawinan antara bangsa penjajah dengan rakyat yang terjajah. Namun anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki identitas yang sama dengan identitas tertinggi dari kedua orang tuanya. Bila si anak tersebut lahir dari ayah yang berkulit putih dan ibunya pribumi maka ia tidak bisa langsung mencapai derajat sebagai ras berkulit putih yang dianggap lebih tinggi walaupun kebetulan kulit yang dimilikinya sama dengan kulit ayahnya.

Hibriditas ras dalam sebuah wilayah koloni adalah produk dari proses *recoding* antara penjajah dan masyarakat yang dijajah. Sebagai sebuah proses tempat pertemuan antara dua kebudayaan dan ras yang berbeda, hibriditas dapat terjadi secara alamiah atau melalui proses komersialisasi. Menurut Deleuze (ibid, 128) hibriditas adalah sebuah keniscayaan dalam relasi yang selaluberagam. Hibriditas menjadi sebuah produk yang dikejar dengan motif mencari keuntungan. Ketika

hibriditas masuk dalam bisnis komersial sebagai bagian dari kerja kapitalisme, hasrat menjadi faktor utama yang menentukan proses komersialisasi tersebut. Barangkali yang dikemukakan Deleuze relevan digunakan untuk mengkaji fenomena banyak artis Indonesia yang memilih pasangan hidup (suami) orang Barat.

### 2.3. Kulturalisme dan Multikulturalisme

Menurut Barker (2005: 20) kulturalisme memberi penekanan pada sifat yang "biasa-biasa saja" dari kebudayaan dan kapasitas aktif dan kreatif manusia dalam membentuk praktik-praktik bersama yang sarat makna. Kajian-kajian empiris, yang dinilai penting dalam tradisi kulturalis, mengeksplorasi cara khas etnisitas manusia secara aktif menciptakan makna kultural. Yang menjadi pusat perhatian kulturalisme yakni ada pada pengalaman hidup keseharian dan mengadopsi definisi kebudayaan yang lebih antropologis, menggambarkan kebudayaan sebagai kehidupan sehari-hari yang tidak terbatas hanya pada seni "tinggi". Sementara itu, bagi Williams dan Thompson, kulturalisme merupakan se bentuk materialisme kultural historis yang melacak perkembangan makna dari masa ke masa, menyelidiki kebudayaan dalam konteks kondisi material yang melingkupi proses produksi dan resepsi kebudayaan. Kulturalisme menempatkan makna sebagai kategori dasarnya dan menganggapnya sebagai produk agen manusia yang aktif, misalnya industri budaya kecantikan. Menurut Hall seperti dikutip Barker (2005; 51) dalam narasi retrospektif kajian budaya, Richard Hoggart, Edward Thompson dan Raymond Williams adalah orang-orang yang mendorong lahirnya pemahaman tentang budaya dan konteks modern yang antropologis dan historis. Pandangan mereka disebut "kulturalisme. Meski ada beberapa perbedaan penting antara tiga tokoh tersebut di atas, akan tetapi ketiganya sama-sama terfokus pada

karakteristik biasa-biasa saja dari kebudayaan dan pada kapasitas aktif dan kreatif orang kebanyakan untuk mengkonstruksi praktik-praktik bersama yang bermakna. Ketiganya juga menaruh perhatian khusus pada persoalan budaya, kelas, demokrasi, dan sosialisme dalam konteks sejarah kelas pekerja Inggris.

Menurut Yaqin (2005: 3), Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran pernyataan itu dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Sekarang ini, jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 13.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri atas 300 sukubangsa yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu mereka juga menganut agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan. Multikulturalisme merupakan suatu fenomena global abad XX, hasil dari percepatan gerak antarmanusia dan kebudayaan serta keduanya hidup berdampingan secara damai. Persyaratan ada atau tidaknya multikulturalisme dalam budaya (*culture*) dan masyarakat (*structure*) suatu negara atau daerah, harus dilihat terlebih dahulu dari ada atau tidaknya perdamaian antarmanusia dan kebudayaan yang berbeda-beda (Wijaya, 2005: 16). Di Bali, perdamaian antarmanusia pemeluk agama yang berbeda-beda telah ada sejak lama. Hal ini terbukti dengan adanya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dari tingkat propinsi sampai kecamatan. Terbentuknya forum tersebut diharapkan terwujud rasa saling menghormati dan menghargai latar belakang perbedaan yang dimiliki masing-masing pihak, sebagai ciri kehidupan masyarakat kontemporer yang sarat diwarnai multikultur.

Menurut Du Bois dan Miley (1992) dikemukakan bahwa yang terpenting dalam masyarakat multikultural adalah memiliki

dan menyepakati nilai-nilai multikulturalisme. Multikulturalisme adalah ide yang menekankan pentingnya saling menghormati antara berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda, adanya penghormatan yang memungkinkan setiap kelompok, termasuk kelompok minoritas, untuk mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa mengalami prasangka buruk dan permusuhan. Sementara itu, menurut Agger (2005:140), multikulturalisme adalah varian teori perbedaan yang mengambil ide dari gagasan posmodernisme bahwa perbedaan manusia secara analitis lebih penting ketimbang kesamaan mereka. Dalam konteks ini Agger mengemukakan lebih jauh, bahwa multikulturalisme merayakan perbedaan sebagai satu kerangka kerja yang ada di dalamnya untuk menghargai banyak kelompok dan narasi khas mereka tentang pengalaman mereka. Senada dengan yang dikemukakan Agger, menurut Barker (2005: 480), strategi multikulturalis juga menginginkan citra-citra positif, tapi tidak mengusahakan terwujudnya asimilasi.

Strategi ini menganggap semua kelompok etnis memiliki status yang setara, dengan hak untuk melestarikan warisan budayanya masing-masing. Multikulturalisme hendak merayakan perbedaan. Menurut Suparlan dalam Yusuf (2005), bahwa multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kelompok kebudayaan. Multikulturalisme merupakan suatu konsep yang ingin membawa masyarakat dalam kerukunan dan perdamaian tanpa ada konflik dan kekerasan. Multikulturalisme menekankan persamaan hak, kewajiban, dan harga diri. Menurut Blum, multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain,

bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri (May, dkk., 2002: 2).

Berbagai pendapat, yang dikemukakan di atas ternyata sangat relevan digunakan untuk mengkaji/menganalisis konfigurasi masyarakat Indonesia, mengingat Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dicirikan oleh adanya keragaman budaya. Keragaman budaya tersebut antara lain terlihat dari adanya perbedaan etnis (suku bangsa), agama, dan bahasa. Pada satu sisi kemajemukan budaya merupakan kekayaan bangsa, namun pada sisi yang lain, pluralitas kultural memiliki potensi, yang menyebabkan terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa.

Berbagai pendapat yang dikemukakan di atas jika dikaitkan dengan kehidupan masyarakat khususnya di Bali, ternyata di Bali sejak dahulu telah diimplementasikan nilai-nilai, semangat yang terkandung dalam konsep multikulturalisme. Hal itu bisa dilihat dengan adanya konsep *menyama braya* di mana orang Bali khususnya masyarakat Bali yang beragama Hindu mengenal istilah *nyama selam, nyama kristen*. Etnis Tionghoa diberikan julukan sebagai *nyame kelihan*. Karena adanya konsep *menyama braya* sebagai aktualisasi ajaran *Tri Hita Karana* maka kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat yang bersifat plural bisa diwujudkan. Inilah Narasi Agung yang sesungguhnya, yang harus dipahami dan diimplementasikan dalam segala kehidupan.

## 2.4. Politik Multikulturalisme, Hak Perorangan, dan Hak Kolektif (Keetnikan)

### 2.4.1. Politik Multikulturalisme Sebelum Zaman Kolonial

Menurut Ardika (2004;3) masyarakat Indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai masyarakat yang bersifat multikultural karena "Orang Asli" berinteraksi dengan para

pedagang yang berasal dari berbagai negara yang sekaligus membawa agama, budaya. Ketika di Indonesia berdiri kerajaan yang berdaulat (Majapahit) dan dalam rangka mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan rakyat Majapahit yang diwarnai adanya kemajemukan maka diwacanakan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika".

Sejarah kehidupan bangsa Indonesia selalu diwarnai oleh sikap toleransi dan asimilasi. Kedatangan unsur-unsur baru dalam kehidupan masyarakat hampir tidak menemui gesekan sosial yang berarti. Terjadi sistem budaya yang berlapis-lapis (sinkritisisme). Masyarakat tidak sekedar mudah beradaptasi terhadap nilai-nilai baru, tetapi juga berhasil mengadopsinya ke dalam struktur sosial budaya mereka. Hal tersebut dibuktikan, misalnya oleh kenyataan sejarah betapa masyarakat Jawa sangat mudah menggabungkan dua atau lebih sistem nilai yang berbeda, kemudian membentuk peradaban Jawa. Sehingga tidak mengherankan bila candi Hindu dan Buddha berdiri saling berdampingan, dan raja-raja Jawa disebut sebagai "Siwa-Buddha" sebagai wujud representasi dialog dua peradaban Hindu Buddha. Kehidupan toleransi semacam ini telah berlangsung di Jawa selama kurang lebih satu milenium sebelum nilai-nilai Islam turut mewarnai kehidupan sosio-kultural masyarakat Jawa pada abad ke-14. Kemudian dari tanah Jawa menyebar ke berbagai wilayah berbagai bentuk pengaruh yang berkaitan dengan penyebaran budaya (Mahfud, 2008:81). Jadi terbentuknya masyarakat multikultural di Indonesia karena adanya perpaduan antara budaya asli dengan budaya-budaya yang dibawa para pedagang dari India, Cina, Arab. Melalui pendekatan budaya para pendatang bisa beradaptasi dengan penduduk asli, sehingga tujuan kedatangannya ke Indonesia berhasil.

### 2.4.2. Politik Multikulturalisme Pada Zaman Penjajahan Belanda

Kedatangan penjajah seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris selain

mempengaruhi terwujudnya masyarakat *social cultural*, juga kenyataan tersebut dimanfaatkan oleh penjajah untuk semakin memperkuat kedudukannya di Indonesia dengan jalan menerapkan strategi/politik adu domba. Hasil penelitian Furnivall seperti ditulis dalam Hefner (2007:17) digambarkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas beraneka ragam ras, etnik sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik, karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai komunitas, yakni komunitas orang kulit putih Belanda, komunitas orang-orang keturunan Cina dan India, serta penduduk pribumi. Furnivall membagi masyarakat Indonesia menjadi tiga golongan, yakni: (1) Golongan Eropa atau kulit putih aktif di berbagai perusahaan perkebunan atau bekerja di sektor pemerintahan; (2) Golongan Cina atau etnis Cina yang memonopoli perdagangan; (3) Golongan pribumi yang bermukim di pedesaan sebagai petani tradisional (Triyono, 1998:46). Untuk mewujudkan ambisinya menguasai Indonesia maka Belanda memanfaatkan keragaman budaya untuk memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi dengan politik multikulturalisme Belanda melakukan “*divide et impera*” (politik adu domba) memecahbelah antar golongan pribumi.

#### 2.4.3. Politik Multikulturalisme setelah Indonesia Merdeka

Setelah bangsa Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaannya ternyata berbagai tantangan harus dihadapi pemerintah bersama-sama dengan bangsanya. Tantangan tersebut tidak hanya mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga mempertahankan eksistensi negara-bangsa (*nation building*) yang sangat sarat diwarnai keragaman budaya. Dalam hubungan itu, Mahfud (2008; 85) mengemukakan bahwa para penguasa negara yang baru merdeka itu, memiliki kecenderungan kuat untuk melaksanakan politik “keseragaman budaya” (*monokulturalisme* atau *monoculturality*).

Lebih jauh ditambahkan, bahwa pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada penerapan politik monokulturalisme, homogenisasi kultur (politik) berakar Jawa (Mataram).

Secara restrospektif politik monokulturalisme yang dilaksanakan khususnya pemerintahan Orde Baru atas nama stabilitas untuk kepentingan pembangunan, telah merusak dan menghancurkan *local culture geniuses*. Politik monokulturalisme yang telah menghancurkan *local genius* itu pada gilirannya mengakibatkan terjadinya kerentanan dan disintegrasi sosial budaya lokal. Saat ini di Orde Reformasi komodifikasi unsur-unsur politik kontemporer menjelang Pemilu 2009 telah mengkhianati demokrasi. Seperti kebulatan tekad yang mengatasnamakan *soroh (clan)*, kekuasaan/ lembaga-lembaga tradisional (subak) Desa Pekraman, dan lain-lainnya. Ketimpangan ekonomi, sosial, politik dan ketidakmampuan masyarakat dalam memahami keragaman kultural mengakibatkan terjadinya pertikaian antar kelompok. Konflik SARA terutama pertikaian antar etnik telah terjadi di hampir semua wilayah Indonesia.

#### 2.4.4. Politik Multikulturalisme pada Era Reformasi

Politik monokulturalisme (azas tunggal, sentralisasi) yang diterapkan pemerintahan Orde Baru tidak perlu diulang lagi. Syafiq A. Mughni dalam Mahfud (2008; viii) mengemukakan, pola pemaksaan kehendak dari pemerintah untuk membentuk satu kehidupan berbangsa yang seragam melalui aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan perlu ditinjau ulang, dan dipertanyakan. Era reformasi dan gelombang demokrasi menuntut pengakuan perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang majemuk. Berakhirnya sentralisme kekuasaan yang pada masa Orde

Baru memaksakan monokulturalisme yang nyaris seragam telah memunculkan reaksi balik, yang bukannya tidak mengandung sejumlah implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Berbarengan dengan proses otonomisasi lokal dan desentralisasi kekuasaan pemerintah juga terjadi peningkatan "provinsialisme" atau "kabupatenisme" yang tumpang tindih dengan "etnisitas". Kecenderungan itu jika tidak dikendalikan akan dapat menimbulkan, tidak hanya disintegrasi sosio-kultural yang amat parah, bahkan juga disintegrasi politik. Terjadi labilitas demokratisasi di Indonesia. Ini merupakan fenomena kultur politik pemecah yang layak untuk dikaji lebih lanjut.

Politik multikulturalisme dalam pemerintahan era reformasi dilakukan perubahan paradigma, dari bersifat sentralistik menjadi desentralisasi. Dan perubahan yang paling fundamental dilakukan adalah ketika pemerintahan Gus Dur, sangat terasa diwarnai adanya "kebebasan" serta penghormatan terhadap nilai-nilai hak azazi manusia. Ketika pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) hal itu semakin dipertegas bahwa Indonesia merupakan negara demokratis dan menghormati berbagai bentuk pluralisme yang dimiliki masing-masing etnis. Demikian pula implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah khususnya dalam bidang pendidikan berupa pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di mana penyusunan dan pengembangannya selain mengacu kepada Standar Pendidikan Nasional juga mengandung muatan lokal. Sebelum diberlakukannya KTSP, berbagai Kurikulum yang pernah diberlakukan ternyata segala sesuatu yang mewarnai kurikulum tersebut ditetapkan secara sentralistik tanpa memperhatikan kepentingan daerah. Sedangkan dalam penyusunan KTSP diserahkan sepenuhnya kepada kepala sekolah, guru, komite sekolah, *stakeholder* dan *user* yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat lingkungannya. Namun

demikian KTSP harus selalu berpedoman dan berlandaskan kepada Dasar Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menghindari disintegrasi sebagai akibat dari euforia "Otda".

Jadi politik multikulturalisme pada pemerintahan era reformasi "mulai" memperlihatkan sifatnya semakin demokratis, memberikan kebebasan warganya untuk menyalurkan aspirasinya secara bertanggungjawab sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan, misalnya dalam proses pemilihan Kepala Daerah (pilkada), penentuan Kepala Dinas Pendidikan. Pada tataran empiris dan pragmatis harus diakui masih banyak terjadi kesalahan dalam mengelola "Otda". *The right man on the right please* atau siapa boleh di mana siapa boleh mengapa sering tidak berlaku.

Keadaan masyarakat yang multikultural tidak untuk dipertentangkan akan tetapi menghargai dan menghormati masing-masing perbedaan, sehingga dibentuk lembaga atau forum lintas agama, etnis, golongan, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Politik multikulturalisme dalam Kabinet Indonesia Bersatu semakin dipertegas untuk melaksanakan Undang-Undang Otonomi Daerah sebagai aktualisasi pemerintahan yang demokratis dan menghormati perbedaan yang dimiliki masing-masing daerah kabupaten/kota. Akan tetapi dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah muncul berbagai masalah, misalnya dalam bidang pendidikan seperti dikemukakan oleh Darmaningtyas (2005:78) bahwa awal kecemasan masyarakat terhadap pelaksanaan otonomi daerah adalah ketika yang diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Nasional adalah orang-orang yang berlatar belakang akademik nonpendidikan. Artinya, mereka yang sebelumnya tidak pernah menangani bidang pendidikan, baik sebagai guru, kepala sekolah, pengawas atau staf di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Sebaliknya yang banyak terjadi mayoritas mantan camat yang merupakan



pejabat bidang sosial politik yang lebih paham bermain politik mengembangkan pendidikan. Ini menunjukkan budaya birokrasi kita yang "kacau". Hal ini disebabkan oleh terjadinya politisasi di berbagai sektor yang dapat memunculkan sikap Primordial.

#### 2.4.5. Hak Perorangan dan Hak Kolektif Kelompok

Dalam kehidupan sehari-hari berbagai media massa, baik media cetak maupun elektronik sering memberitakan berbagai bentuk permasalahan yang berhubungan dengan "hak perorangan dan hak kolektif 'kelompok'", seperti berita penggusuran, adanya mafia peradilan dalam kasus pertanahan, kasus proyek LAPINDO Brantas yang menyengsarakan penduduk daerah Sidoarjo, Jawa Timur yang sampai saat ini pemberian ganti rugi atas tanah yang dimiliki belum tuntas, serta di Bali sering terjadi kasus perebutan batas desa. Berbagai berita tersebut menyangkut permasalahan "tanah", baik yang berhubungan dengan Hak Perorangan, maupun Hak Kolektif Kelompok. Terkait dengan jhal itu, Daeng (2005; 55), menguraikan kepemilikan tanah yang bersifat perorangan maupun kolektif. Dalam tulisannya dikemukakan sebagai berikut:

"Setiap hari dapat diikuti melalui mass media berbagai hal yang menyangkut masalah tanah itu, seperti ada transmigran yang diusir dari lahan garapannya, karena anggota suku setempat sebagai pemilik tanah tidak tahu menahu tentang adanya pemukiman baru yang namanya transmigran; ada tanah yang dijual pamong desa, sedang tanah itu adalah tanah bengkok milik desa; dalam mengurus sertifikat tanah, tanah menjadi sumber pendapatan bagi oknum-oknum tertentu merupakan hal yang biasa... "

Pada tulisan tersebut secara implisit terjadi pertentangan antara hak perorangan dengan hak kolektif kelompok, dan semakin diperparah dengan adanya intervensi pihak ketiga. Realitas itu terjadi karena bagi rakyat dalam konteks pribadi (perseorangan) dalam hal kepemilikan tanah sering diperlakukan sebagai pihak yang lemah sehingga sering digusur dengan berbagai alasan, walaupun terkadang mereka memiliki bukti-bukti kepemilikan atas tanah. Semestinya rakyat harus diayomi, dilayani, dicerdaskan malah justru semakin diperbodoh. Bagi rakyat "tanah" adalah segala-galanya, sehingga untuk mempertahankannya terkadang nyawa melayang. Pada bagian lainnya dikemukakan, bahwa dalam hal penguasaan tanah dari negara, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Akan tetapi dalam kenyataannya untuk memenuhi kebutuhan akan tanah berbagai proyek pembangunan, pemerintah terpaksa membebaskan tanah milik rakyat (perorangan) maupun kelompok. Realitas tersebut sering menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi maupun politik. Kemudian diperparah adanya calo-calo tanah yang bergentayangan mengintimidasi, memberikan janji-janji palsu kepada pemilik tanah. Berita penggusuran penduduk, demonstrasi masyarakat terhadap tuntutan uang ganti rugi atas tanah yang ditempati yang ditayangkan berbagai TV Nasional sebagai pertanda betapa vitalnya tanah bagi kehidupan manusia.

Menurut Fakhri (1995; 1) dewasa ini kita tengah menyaksikan suatu proses menuju krisis sosial yang disebabkan oleh sengketa tanah. Tanah sejak lama memang menjadi hal sangat rawan dan potensi pemicu krisis sosial. Gejala krisis sosial akibat sengketa tanah telah memanifestasi dalam bentuk pertentangan kepentingan atas tanah, antara rakyat dan negara, maupun antara rakyat dengan pemilik modal. Pola sengketa tanah tersebut ada yang

bersifat telanjang, yakni adanya keterlibatan secara kongkrit, maupun ada yang bersifat sistematis dan struktural sehingga sulit diidentifikasi. Dalam tulisan tersebut yang sering menjadi korban adalah hak milik perorangan. Secara khusus jika berbicara tentang hak perorangan maupun hak kolektif dalam kepemilikan tanah relevan dikemukakan tulisan Dharmayuda (2004; 120) bahwa tanah-tanah adat di Bali sesuai dengan ketentuan konvensi dari UUPA (UU Nomor 5/1960) tercantum dalam pasal 2 dengan sebutan tanah hak atas *druwe* atau tanah hak atas *druwe* desa. Di Bali dikenal dengan sebutan Tanah *Druwe Desa* yang terdiri dari: (a) tanah desa; (b) tanah *laba pura*; (c) tanah pekarangan desa; (d) tanah *ayahan desa*. Di samping tanah-tanah di atas di Bali dikenal juga tanah-tanah pribadi yang merupakan tanah hak milik yang bebas dari *ayahan*.

Di Bali sering terjadi sengketa antara dua *krama* (warga) desa yang memperebutkan tanah tapal batas desa. Kasus itu terjadi karena kurang dijalinnya komunikasi antarwarga, terutama komunikasi yang dilakukan antarprajuru (pengurus) desa *pakraman*, dan atau antar kepala desa dinas (*perbekel*). Pada aspek lainnya terjadinya sengketa tanah juga dilatarbelakangi oleh faktor-faktor ekonomis. Menurut Bagus (1996; 17) Pariwisata sebagai bagian dari globalisasi yang bersifat kapitalistik telah melanda Bali. Suatu alih fungsi menjadi multi fungsi mengakibatkan tanah kemudian menjadi sangat penting bagi orang Bali, bahkan sering menjadi sumber sengketa atau konflik di masyarakat, baik antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan pihak luar (*investor*). Berbagai konflik yang berhubungan dengan tanah yang sering terjadi khususnya di Bali dalam Naradha (2004; 7) diuraikan bahwa Tanah Bali telah Habis Terjual. Karena Bali kebanjiran investor dari luar Bali pada gilirannya akan mengganggu Hak Perorangan maupun Hak Kolektif atas kepemilikan tanah. Ketika pemerintahan era Orde Baru berbagai permasalahan tanah, baik

yang bersifat telanjang maupun yang bersifat sistematis dan struktural sering mewarnai kehidupan masyarakat Bali yang potensial dikembangkan menjadi kawasan pariwisata, sehingga dikenal kasus Pecatu, Padanggalak, Bali Nirwana Resort Tanah Lot.

Terkait dengan Hak Kolektif dalam tulisan Daeng (2005; 58) dikemukakan adanya Tanah Suku yaitu tanah yang menjadi milik bersama suatu suku, dikuasai suku, yaitu suatu kelompok manusia yang antara sesamanya ada atau dibayangkan ada dan terjalin atau pernah terjalin suatu hubungan genealogis. Semua anggota kelompok genealogis itu mempunyai hak atau diberi hak yang sama untuk mengolah tanah setelah kepala suku diberitahu dan diminta persetujuannya. Yang diuraikan Daeng diimplementasikan juga dalam kehidupan pada beberapa masyarakat di Bali, seperti yang terjadi di Desa Tenganan, Karangasem.

### 3. Simpulan

Isu tentang etnis dan etnisitas dalam masyarakat Indonesia yang majemuk merupakan realita yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Para anggota kelompok etnis dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasana askriptif primordial etnisitas mereka. Akibatnya perbedaan antara 'siapa saya' dengan 'siapa anda' atau 'siapa kami' dengan 'siapa mereka' terlihat dengan jelas batas-batasnya. Dalam kenyataan seperti itu, stereotip dan prasangka tumbuh dan berkembang dengan subur. Menurut Ting-Toomey (1999:30) identitas kultural adalah perasaan (*emotional significance*) dari seseorang untuk ikut memiliki (*sense of belonging*) atau berafiliasi dengan kultur tertentu. Masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok kemudian melakukan identifikasi kultural, yaitu masing-masing orang mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Identifikasi kultural menurut Rogers & Steinfatt (1999: 97) akan menentukan

individu-individu yang termasuk dalam *in-group* dan individu-individu yang berada dalam *out-group*. Bagaikan pelangi yang bebas menunjukkan identitas tanpa ada rasa dominasi, ketertindasan, dan hegemoni. Kesetaraan yang harus diperjuangkan dan ditegakkan sampai kapanpun. Seperti dinyatakan oleh teori Feminisme “Mengembangkan perbedaan bukan sebagai hal yang buruk, namun sebagai satu bentuk apresiasi heterogenitas dunia maupun refleksi posisi subjek yang berbeda” (Agger, 2008:214). Bila semua etnik (suku bangsa) yang menjadi warga negara Indonesia diliputi stereotip dan prasangka keliru terhadap etnik lainnya, maka stabilitas nasional, persatuan dan kesatuan bangsa sulit diwujudkan, karena setiap etnis berada dalam lingkup pergaulan yang eksklusif. Realitas seperti itu memicu konflik karena dilatar belakangi perbedaan etnik yang terjadi pada berbagai tempat di Indonesia.

#### Daftar Kepustakaan

Agger, Ben. 2008. *Teori Sosial Kritis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Ardika, I Wayan dan Darma Putra. 2004. *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press.

Atmaja, Nengah Bawa. 2006. “Pemulihan Krisis Kebangsaan dan Multikulturalisme Dalam Perspektif Kajian Budaya” (Makalah). Singaraja: Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

Bagus, I Gusti Ngurah. 1996. “Keresahan dan Gejolak Sepuluh Tahun Terakhir di Bali, Beberapa Catatan Tentang

*Perubahan Sosial di Era Globalisasi*” dalam Henri Chambert-Loir dan Hasan Muarif Ambary (ed), *Panggung Sejarah Persembahan Kepada Prof.Dr. Denys Lombard*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Barker, Chris. 2005. *Cultural Studies, Teori dan Praktek* (Diterjemahkan oleh Tim KUNCI Cultural Studies Center). Yogyakarta: Bentang.

Blum, L.A. 2001. “Antirasisme, Multikulturalisme dan Komunitas Antar-Ras, Tiga Nilai Yang Bersifat Mendidik Bagi Sebuah Masyarakat Multikultural”, dalam Larry May, Shari Collin-Chabanian dan Kal Wong, (ed). *Etika Terapan Sebuah Pendekatan Multikultural*. (Penterjemah: Sinta Carolina). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Brah, A. 1996. *Cartographies of Diaspora*. London: Routledge

Daeng, Hans J. 2005. *Manusia Kebudayaan dan Lingkungan, Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darmaningtyas. 2005. *Pendidikan Rusak-rusakan*. Yogyakarta: LKiS

Dharmayuda, I Made Suasthawa. 2001. *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*. Denpasar: Upada Sastra.

Fakih, Mansour. 1995. *Tanah, Rakyat dan Demokrasi*. Yogyakarta: Forum LSM-LPSM – DIY.

Hafner, Robert W. 2007. *Politik Multikulturalisme, Menggugat Realitas Kebangsaan*. (diterjemahkan oleh: Bernardus Hidayat). Yogyakarta: Impulse dan Kanisius.

Hardiman, Budi. 1993. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius

Koentjaraningrat. 1989. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Kompas, 28 September 2004.

- Liliweri, Alo. 2003. *Dasar-dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2005. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKiS.
- Mahfud, Choirul. 2008. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Mulyana, Deddy; Jalaluddin Rakhmat (ed). 2000. *Komunikasi Antar Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rahardjo, Turnomo. 2005. *Menghargai Perbedaan Kultural, Mindfulness Dalam Komunikasi Antaretnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rogers, Everett M; Thomas M. Steinfatt. 1999. *Intercultural Communication*. Illinois: Waveland Press, Inc.
- Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto. 2005. *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ting-Toomey, Stella. 1999. *Communication Across Culture*. New York: The Guilford Publication, Inc
- Trijono, Lambang dan Suharko. 1998. *Sosiologi 2*. Jakarta: Depdikbud.
- Yaqin, M. Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
-